

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Simpulan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya tulisan-tulisan dalam beberapa surat kabar mengenai bahasa yang digunakan oleh para penguasa dalam menyampaikan kebijakan. Kata-kata yang digunakan sering mengandung makna ganda.

Untuk mengetahui hal itu, peneliti mengangkat suatu persoalan yang difokuskan pada semantik (maknanya). Analisis semantik dilakukan untuk mengetahui makna-makna kata dalam bahasa politik dan tujuan penggunaannya.

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa ragam bahasa politik mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu diperlukan pemahaman yang sama antara penguasa sebagai penutur, dan masyarakat pembaca, agar apa yang diharapkan dapat tercapai.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah, bagaimanakah makna ragam bahasa politik yang ada dalam media cetak tersebut? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui makna yang terkandung dalam bahasa politik tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Surat kabar *Kompas* lebih banyak memuat ragam bahasa politik (70,6%) daripada surat kabar *Republika* yang hanya (29,6%). Artinya, surat kabar *Kompas* banyak memuat kebijakan-kebijakan politik yang dituturkan oleh penguasa, karena *Kompas* merupakan konsumsi kaum intelektual.
2. Ragam bahasa politik yang digunakan para penguasa dalam surat kabar cenderung mengalami pergeseran dan perubahan makna, yaitu sebesar (82,4%). Artinya kata-kata yang digunakan tidak merujuk kepada makna yang sebenarnya (denotatif).
3. Makna yang paling banyak terkandung dalam bahasa politik tersebut adalah berupa kiasan (60,8%), artinya para penguasa banyak menggunakan kata-kata yang bukan bermakna sebenarnya (denotatif). Disusul dengan penghalusan (19,6%) penekanan (15,7%), pertentangan (11,8), dan membenaran dengan mencari alasan (3,9%).
4. Pada umumnya ragam bahasa politik yang digunakan bertujuan untuk membuat variasi dalam kalimat (33,3%), dan untuk penegasan (31,4%), Artinya, kata-kata yang digunakan bertujuan untuk memberikan penegasan-penegasan dalam menyampaikan kebijakan atau keputusan. Selain itu bertujuan untuk menghaluskan makna (19,6%), untuk mengajak atau menghimbau (13,7%), untuk membenarkan (3,9%), dan untuk menghormati (2%).

B. Implikasi

Hasil penelitian ini dapat berimplikasi bagi pengajaran Bahasa Indonesia. Dengan mengetahui ragam bahasa politik yang dituturkan oleh penguasa dalam surat kabar, siswa dapat memperluas khazanah pengetahuan tentang makna-makna kata yang terdapat dalam bahasa politik tersebut. Ruang lingkup pengetahuan bahasa siswa lebih luas, dan siswa lebih kritis dalam menanggapi masalah-masalah atau persoalan-persoalan yang ada dalam masyarakat, seperti bidang sosial, politik, ekonomi, hukum, yang sekaligus mampu menumbuhkan sikap kepedulian sosial. Siswa mampu memahami istilah-istilah yang dikemukakan para penguasa dalam rangka memperkaya kosakata bahasa. Siswa mampu meningkatkan kreativitas berpikirnya dalam menganalisis makna kata-kata, serta mampu memberikan interpretasi terhadap bahasa berdasarkan konteks situasi.

C. Saran-saran

Setelah penulis melihat hasil analisis dan simpulan terhadap ragam bahasa politik, maka dapat dikemukakan beberapa saran. Saran ini ditujukan kepada para penguasa yang sangat potensial dalam penggunaan ragam bahasa politik, para wartawan yang berfungsi untuk mentransfer bahasa-bahasa penguasa ke dalam media massa khususnya surat kabar, dan para pakar bahasa sebagai pemantau atau pengamat penggunaan bahasa-bahasa dalam masyarakat. Saran-saran tersebut sebagai berikut.

1. Para penguasa atau pejabat dalam mengemukakan kebijakan-kebijakan politik kepada masyarakat sebaiknya menggunakan kata-kata yang sederhana atau bahasa yang mudah dicerna oleh masyarakat luas. Hal ini sangat penting dan bermanfaat agar program-program atau kebijakan yang dibuat dapat dipahami dan berjalan lancar tanpa tanggapan atau persepsi yang berbeda dari masyarakat.
2. Wartawan sebagai pengasuh media massa khususnya surat kabar, hendaknya mampu menyaring tulisan-tulisan yang akan dimuat, agar apa yang dimaksud tidak menyimpang. Bahasa surat kabar harus singkat, jelas, dan sederhana agar mudah dipahami oleh pembaca, karena surat kabar tersebut dibaca oleh masyarakat Indonesia yang memiliki tingkat intelektual yang tidak sama. Oleh sebab itulah para wartawan berperan aktif dalam mengemas berita-berita atau informasi yang akan dipublikasikan, agar dipahami oleh masyarakat sampai pada tingkat intelektual yang paling minim.
3. Sumbangan para ahli bahasa sangat diharapkan untuk memberikan masukan atau kritik yang membangun terhadap penggunaan bahasa dalam surat kabar, khususnya ragam bahasa politik yang dituturkan oleh para penguasa, agar kecenderungan penggunaan bahasa yang menyimpang dalam menciptakan bahasa yang komunikatif tidak membudaya dan mendarah daging dalam masyarakat.

4. Perlu ada kerja sama antara penguasa sebagai penutur, wartawan sebagai mediator informasi kepada masyarakat, dan ahli bahasa sebagai kontrol atau pengawasan pemakaian bahasa yang baik dan benar.
5. Bagi peneliti berikutnya dianjurkan untuk meneliti ragam bahasa politik dari aspek-aspek lain agar lebih lengkap seperti analisis wacana, atau dapat melibatkan mahasiswa dan masyarakat untuk mengetahui lebih jauh bagaimana persepsi mereka terhadap ragam bahasa politik tersebut. Dengan adanya penelitian yang semakin luas tentang bahasa, maka pengembangan dan pendidikan bahasa akan semakin baik.

